



LPT

Laporan Penundaan Transaksi

Maret 2023

PEMENUHAN ASPEK



88,51%

Aspek penundaan transaksi yang terbanyak adalah **Aspek Formil Terpenuhi, Aspek Materil Tidak Terpenuhi**

PIHAK PELAPOR



77,70%

Mayoritas penundaan transaksi didominasi oleh **Bank Swasta**

NOMINAL TRANSAKSI



85,71%

Mayoritas nominal transaksi yang ditunda **Dibawah Rp100 juta**

JENIS TERLAPOR



98,44%

Mayoritas penundaan transaksi dilakukan oleh **Perorangan**

JENIS TRANSAKSI



47,54%

Jenis Transaksi Penundaan terbanyak **Electronic Banking**

WILAYAH



79,05%

Mayoritas penundaan transaksi terjadi di **DKI Jakarta**

ALASAN PENUNDAAN



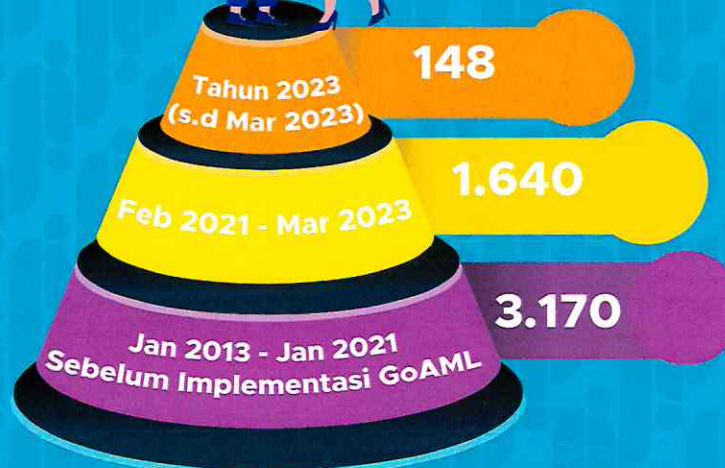
73,68%

Alasan penundaan transaksi terbanyak:

Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan HK yang berasal dari hasil tindak pidana

Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung HK yang berasal dari hasil tindak pidana

Pengguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu



● Pelaporan LPT dimulai sejak Januari 2013

Penerimaan Laporan Penundaan Transaksi pada Maret 2023

64 Laporan

Pelaporan LPT bulan ini

72,97%

Dibandingkan bulan Februari 2023 (m-to-m)

Pelaporan LPT bulan ini

-55,86%

Dibandingkan bulan Maret 2022 (y-on-y)

Grafik 15. Jumlah LPT yang diterima PPATK per bulan selama 1 tahun terakhir



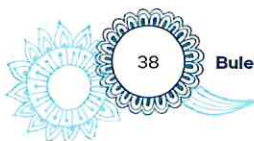
Tabel 25. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Pihak Pelapor

Kelompok Industri	2021	2022	2022												2023		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Bank	178	1.295	143	89	80	75	48	150	172	216	41	23	45	37	61		
Bank Umum	178	1.294	143	89	80	75	48	150	171	216	41	23	45	37	61		
Bank Asing	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bank Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bank Milik Negara	23	44	7	3	1	1	-	2	2	2	3	-	4	8	10		
Bank Pembangunan Daerah	8	16	-	1	1	-	2	-	1	1	2	-	2	4	-		
Bank Swasta	141	1.234	136	85	78	74	46	148	168	213	36	23	39	25	51		
Bank Perkreditan Rakyat	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
Non Bank	18	9	2	2	-	1	-	-	2	-	1	1	2	0	3		
Total	196	1.304	145	91	80	76	48	150	174	216	42	24	47	37	64		



UU No. 8 Tahun 2010
Pasal (26) Ayat (1)

1. Penyedia Jasa Keuangan dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan.
2. Penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa
 - a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
 - c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
3. Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.
4. Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.
5. Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.
6. Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini
7. Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.



Tabel 26. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Materil

Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil	2021	2022	2022										2023		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi	62	19	5	1	-	-	2	3	2	2	-	2	2	1	3
Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi	130	1.232	139	90	77	74	44	114	170	214	36	20	42	32	57
Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi	2	52	1	-	3	1	2	33	2	-	6	2	1	4	4
Total	196	1.304	145	91	80	76	48	150	174	216	42	24	47	37	64

Tabel 27. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Kategori Nominal Transaksi yang Ditunda

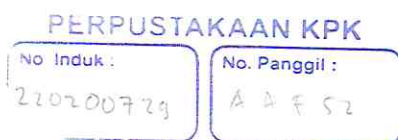
Kategori Nominal Transaksi	2021	2022	2022										2023		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dibawah 100 juta	149	1.284	140	90	80	75	46	147	172	214	42	22	8	16	24
Rp100 Juta s.d Rp1 Milyar	27	11	3	1	-	1	-	2	1	-	-	1	3	1	3
Diatas Rp1 Milyar	20	9	2	-	-	-	2	1	1	2	-	1	1	-	1
Tidak Terisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	20	36
Total	196	1304	145	91	80	76	48	150	174	216	42	24	47	37	64

Tabel 28. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Transaksi yang Ditunda

Jenis Transaksi	2021	2022	2022										2023		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Electronic Banking ^{*)}	37	13	1	3	-	1	1	1	-	1	-	2	9	6	14
Tarik/Setor Tunai	83	29	5	3	1	-	4	2	5	1	1	1	-	-	-
Polis Asuransi	10	6	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-
Remittance	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	24	41	5	1	-	1	-	6	1	-	4	1	2	10	18
Tidak Terisi	38	1.214	131	83	79	74	43	141	167	213	36	19	34	21	32
Total	196	1.304	145	91	80	76	48	150	174	216	42	24	47	37	64

Catatan:

^{*)} Electronic Banking meliputi Transfer Bank, Autodebet, ATM, E-Banking/Mobile Banking, dan sebagainya



Tabel 29. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan

Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan	2021	2022	2022										2023		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	160	1.294	144	90	80	76	46	150	174	215	39	24	45	36	63
Pegawai Swasta	21	151	25	11	5	2	3	11	21	20	5	3	9	13	7
Pengusaha/Wiraswasta	88	250	36	12	12	12	7	19	37	49	9	4	6	9	11
Pedagang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNS termasuk pensiunan	6	68	18	3	4	5	6	5	2	3	1	-	2	2	1
Ibu Rumah Tangga	12	124	18	6	3	5	4	12	28	22	5	4	5	5	11
Professional dan Konsultan	1	16	1	-	1	-	1	5	-	3	1	2	2	-	1
PEPs	-	8	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-
Buruh	1	7	-	-	-	-	-	-	4	2	-	1	-	-	2
TNI/POLRI (termasuk Pensiunan)	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Pelajar/Mahasiswa	1	91	5	4	5	8	-	6	11	31	2	3	5	4	5
Pengajar/Dosen	-	8	1	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
Lain-Lain	26	567	39	53	50	43	25	89	66	82	15	7	12	2	23
Pegawai BUMN	3	3	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Pegawai Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Petani dan Nelayan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1
Korporasi	36	10	1	1	-	-	2	-	-	1	3	-	2	1	1
Total	196	1.304	145	91	80	76	48	150	174	216	42	24	47	37	64

Tabel 30. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi

Alasan Penundaan Transaksi	2021	2022	2022										2023		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pertimbangan (1) dan (2)	8	8	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-
Pertimbangan (1) dan (3)	54	50	-	-	-	-	12	-	-	-	5	1	-	-	-
Pertimbangan (2) dan (3)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertimbangan (1) saja	37	25	-	2	-	2	1	3	4	3	-	2	3	8	13
Pertimbangan (2) saja	23	27	9	3	1	-	3	5	-	-	1	2	1	2	2
Pertimbangan (3) saja	40	13	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4
Pertimbangan (1); (2) dan (3)	15	1.162	130	86	78	72	31	141	165	212	33	19	37	27	34
Total	178	1.285	142	91	79	75	48	150	170	215	39	24	43	37	53

Catatan:

Pertimbangan 1: Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana

Pertimbangan 2: Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana

Pertimbangan 3: Pengguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu

